

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Oktober 2018/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MISHARUDDIN
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 481032

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/160 m2 di ACEH SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di ACEH SELATAN, WARISAN Rp. 30.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/25 m2 di ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/25 m2 di ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/7 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **276.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **10.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **---****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **---**



Sub Total	Rp.	1.036.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.036.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.